

# Strategi Pembangunan Pedesaan melalui Implementasi Desa Sejahtera Mandiri (DSM) di Malang dan Mojokerto

Suprpto, Santoso  
Universitas Islam Majapahit

## Abstrak

Desa Sejahtera Mandiri (DSM) bertujuan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah penurunan jumlah fakir miskin dan pemberian kecakapan/*softskill*. DSM berupaya menuntaskan jumlah fakir miskin dan upaya kesejahteraan di 4 Desa (Gajahrejo, Sidodadi, Pamotan, dan Lebakjabung). Penelitian ini ingin memusatkan pada perencanaan, pelaksanaan dan sasaran program DSM. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kebijakan secara partisipatif. Sumber data pada penelitian ini adalah LP2M UM, TKSK, Perangkat Desa, sebagian penerima program, Pemuda Desa, dan Pokdarwis/LMDH. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, *focus group discussion* (FGD), dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan program DSM yang sudah terlaksana adalah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan pengembangan wisata. Dengan sasaran program sesuai dengan kriteria penerima sesuai data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Telah dibangun 30 RTLH dan dibentuk 2 (dua) KUBE per masing-masing desa. Maka dari target DSM, masih 2 (dua) program yang terlaksana dari 9 (sembilan) pencapaian program. Pada bidang pengembangan wisata telah berjalan sesuai konsep wisata yang ditetapkan.

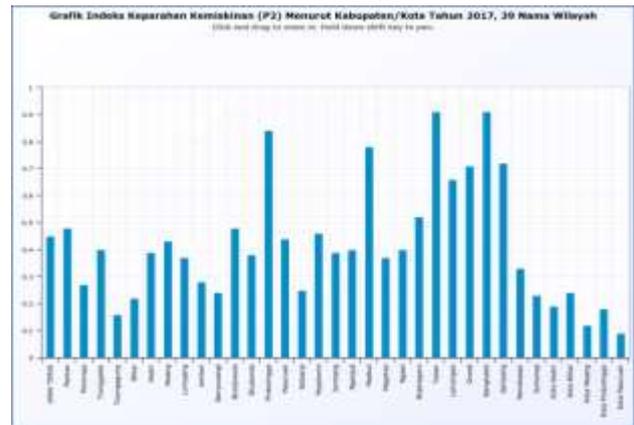
**Kata kunci:** strategi, DSM, kesejahteraan, kebijakan

## I. Pendahuluan

Kemiskinan telah menjadi bagian masalah laten di Indonesia. Setiap pergantian kepemimpinan, kebijakan, maupun program kemiskinan tetap tak bisa dituntaskan. Terdapat jenis-jenis kemiskinan yang terjadi di Indonesia, yakni: (1) kemiskinan terstruktur, (2) dibentuk/dipelihara, dan (3) disengaja. Sedang jika menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kriteria kemiskinan, setidaknya ada 10 (sepuluh), yakni: (1) makan kurang dari 2x sehari, (2) tidak ada beda baju kerja dan baju tidur, (3) tidak memiliki penerangan listrik, (4) tidak memiliki air bersih, (5) luas tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang, (6) tidak memiliki akses kesehatan, (7) rumah berubin tanah, (8) dinding rumah dari bambu atau papan kualitas rendah, (9) tidak ada barang elektronik di bawah 500 ribu, dan (10) bahan bakar dari kayu/minyak tanah. Jika masuk kategori 1-9, maka ia kategori sangat miskin

Berdasarkan data BPS Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Malang tercatat sebesar 292.87 (2015), 293.74 (2016), dan 283.96 (2017). Tahun 2017 mengalami penurunan, namun penurunannya belum signifikan. Dengan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Malang 2017 sebesar 0,43. Berikut grafik indeks keparahan kemiskinan di Jawa Timur:

Gambar 1: Grafik Indeks Keparaharan Kemiskinan di Jawa Timur



Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha telah berupaya semaksimal mungkin menurunkan angka kemiskinan dengan program dan kegiatan bantuan sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Pelaksanaan dan kegiatan tersebut cenderung berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah tidak cukupnya sumber ekonomi yang menampung kehidupan masyarakat di suatu wilayah (desa). Hal ini bukan disebabkan oleh karena tidak mendukungnya potensi yang ada di wilayah tersebut. Namun lebih disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola dan mengolah sumberdaya yang dimiliki. Disamping itu masih banyak masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain: fakir miskin, Rumah Tidak layak Huni, wanita rawan social ekonomi. Sesuai Undang-undang tentang PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar pelaksanaan: (1) rehabilitasi sosial, (2) jaminan sosial, (3) perlindungan sosial, (4) pemberdayaan sosial, dan (5) penanggulangan kemiskinan.

Dilihat dari kriteria data BPS tentang kemiskinan, masyarakat penerima program RTLH, cukup menjadi bukti sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin. Adapun jenis PMKS yang kemudian menjadi sasaran program di Desa Gajahrejo dan Desa Sidodadi adalah sebagai berikut:

Suprpto, Universitas Islam Majapahit, Jl. Raya Jabon KM 0.7 Mojokerto, email: [suprpto@unim.ac.id](mailto:suprpto@unim.ac.id)  
Santosa, Universitas Islam Majapahit, Jl. Raya Jabon KM 0.7 Mojokerto, email: [suprpto@unim.ac.id](mailto:suprpto@unim.ac.id)

**Tabel 1: Jenis PMKS dan Program Prioritas**

No	Jenis PMKS	Program Prioritas
1	Penyandang Cacat	-
2	Fakir Miskin	-
3	Keluarga Rentan	-
4	Anak Terlantar	-
5	Lansia Terlantar	-
6	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-
7	Gelandangan	-
8	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	-
9	RTLH	✓
10	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-

Sumber: Data Diolah

Sedangkan jenis PSKS yang menjadi prioritas yakni program KUBE sebagaimana yang terangkan oleh Kementerian Sosial. Program RTLH dan KUBE adalah bagian dari program yang menysasar pemberdayaan bersifat *empowerment*. Meski bukan penerima yang sama atau bagaimana ekonomi kreatif dikembangkan bagi penerima program RTLH.

Program RTLH lebih didasarkan pada faktor kemiskinan-kesejahteraan. Meski kemiskinan-kesejahteraan masih dimaknai berupa kebutuhan fisik. Tak hanya materi dan fisik, namun juga menyangkut harga diri. Harga diri ini lebih tepatnya pada tindakan diskriminasi orang miskin di masyarakat, (Chambers, 2006), (Spicker, 2007). Sedang program KUBE lebih didasarkan pada pemberdayaan. Menurut Ife dan Tesoriero, (2014) pemberdayaan mencakup proses, pelaksanaan, dan hasil, dengan pendekatan *top-down*.

Pendekatan yang dibidik oleh DSM merupakan masyarakat yang memiliki keswadayaan, partisipasi dan kesetiakawanan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa. Melalui pemanfaatan sumberdaya, desa perlu memiliki orientasi pengembangan wisata. Potensi yang melimpah tersebut, harus dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan warganya.

Pada dasarnya, masyarakat merupakan sasaran utama dari pelaksanaan desa sejahtera mandiri (DSM), karena DSM merupakan kegiatan fungsional yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi berbagai kendala yang ditemui masyarakat karena keterbatasan sumber daya. Untuk itu, setidaknya pelaksanaan DSM dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang diantaranya adalah: (1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga untuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan dan pengembangan masyarakat; (2) Memperoleh berbagai pengalaman pembaharuan, baik berupa konsep, referensi wawasan, hingga referensi dan jaringan sumber daya pendukung.

Pemerintah pada dasarnya juga dapat melaksanakan dibidang pelayanan kepada masyarakat, karena fungsi dari Pemerintah adalah untuk melakukan berbagai fungsi pelayanan publik. Bentuk dari pelayanan publik pemerintah justru bukan peninggalan-peninggalan berbentuk fisik atau material, melainkan juga beberapa hal terkait efektivitas dan efisiensi pelayanan, termasuk juga peluang untuk mengembalikan orientasi pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan

masyarakat, sehingga mempunyai kesadaran yang dapat dilihat melalui "rasa memiliki" masyarakat. Karena, setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan pemerintah melalui pelayanan masyarakat, yakni: (1) melakukan kebaruaran dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik secara efisien dan efektif; (2) Berkesempatan untuk bersama dengan para pelaksana pemberdayaan dalam mengurai serta merumuskan solusi terbaik melalui asesmen kebutuhan masyarakat.

Dari latar belakang penelitian ini memberikan rumusan dan tujuan penelitian yang dimaksudkan mengetahui dan menjelaskan dua hal, yakni: (1) efektivitas pelaksanaan DSM dalam pembangunan pedesaan, (2) strategi pembangunan pedesaan melalui pelaksanaan DSM. Penelitian ini memberi manfaat bagi para pemangku kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

## Kajian Pustaka

### 1. Konsep Partisipasi

Model Phil Treseder (1997) adalah menjauh dari dan menanggapi beberapa kritik yang paling sering tentang metafora tangga, yang bertujuan untuk menggambarkan bahwa tidak ada hierarki progresif atau urutan tertentu di mana partisipasi harus selalu dikembangkan. Treseder berpendapat bahwa perlu ada batasan untuk keterlibatan anak-anak dan remaja, tetapi mereka tidak akan dapat terlibat dalam proyek yang diprakarsai anak dan diarahkan langsung dan perlu diberdayakan cukup untuk dapat berpartisipasi penuh, (Freudenberger, 9).

Dalam hal partisipatif, menurut Chambers (2006) pendekatan ini berimplikasi agar masyarakat terlibat aktif untuk dapat menentukan rencana dan melaksanakannya. Dengan pendekatan PRA (*participation rural appraisal*), konsep yang dipakai adalah partisipatif, luwes, kerjasama, hemat, dan sistematis. Pendapat Midgley *et al* (dalam Claridge 2004: 17) mengemukakan partisipasi masyarakat bermuara pada pengembangan masyarakat yang berujung pada kontribusi kerja sosial.

Membincang partisipasi bagi Lane (dalam Claridge: 2004); Mansuri dan Rao (2012); Gaventa (2013); Menocal dan Sharma (2008) berarti membicarakan pelaksanaan proyek pada orientasi biaya sosial. Bentuk partisipasi akhirnya mengarah pada kebijakan, atau malah tindakan partisipatif sebagai pelaksana kebijakan, Kvalvaag (2013: 4-8).

### 2. Kebijakan Publik

Agenda, seperti yang saya bayangkan, adalah daftar subyek atau masalah yang berhubungan erat dengan pejabat pemerintah, dan orang-orang di luar pemerintah dengan para pejabat itu, memberikan perhatian serius pada waktu tertentu, (Viana, 2014). Saya harus menyebutkan apa yang telah disebut sebagai 'kebijakan simbolik', yang merupakan program pemerintah yang kurang lebih tidak memiliki kesempatan untuk tidak meringankan masalah yang mendasarinya atau tidak dimaksudkan untuk melakukannya. Sebaliknya, mereka hanya mencari untuk memenuhi tuntutan publik bahwa pemerintah 'melakukan sesuatu'. Barang publik, model pengecualian masalah di sini adalah lebih untuk mencoba untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik pada jenis tindakan pemerintah (kebijakan publik) yang harus dilibatkan.

Kebijakan publik disaring melalui proses kebijakan khusus, diadopsi, diimplementasikan melalui undang-undang, langkah-langkah pengaturan, tindakan pemerintah, dan prioritas pendanaan, dan ditegakkan oleh lembaga publik. Individu dan kelompok berupaya membentuk kebijakan publik melalui mobilisasi kelompok kepentingan, pendidikan advokasi, dan lobi politik. Kebijakan resmi memberikan panduan kepada pemerintah tentang serangkaian tindakan dan juga menyediakan hubungan akuntabilitas timbal balik antara pemerintah dan warganya. Proses kebijakan mencakup beberapa aspek utama: definisi masalah yang harus ditangani, tujuan kebijakan yang ingin dicapai, dan instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan kebijakan (Cochran and Malone, 2014: 3).

Namun, menurut Andrews (Fischer, Miller, Sidney, 2007: 164) kriteria Pareto juga memiliki komponen prosedural yang mempromosikan keadilan serta efisiensi: ia membutuhkan partisipasi bulat dan sukarela dalam transaksi untuk memastikan bahwa keputusan tidak kalah, hanya keuntungan bersama. Kriteria Kaldor-Hicks lebih memaksa secara prosedural, menyiratkan aturan mayoritas, dan kediktatoran oleh perencana sosial paling buruk. Namun, secara realistis, banyak hal yang diperlukan oleh peradaban untuk membebaskan biaya pada beberapa orang demi mendapatkan manfaat sosial yang luas. Contohnya termasuk pendidikan publik, perpajakan penghasilan progresif, jalan raya, pembangkit listrik, pabrik pengolahan limbah.

Karena setiap kebijakan syarat akan kepentingan, George Yebelis (dalam Hacker, 2004) menyampaikan, stabilitas kebijakan meningkat ketika lebih banyak aktor atau badan pembuat keputusan harus setuju berubah, ketika jarak ideologis di antara mereka lebih besar, dan ketika mereka lebih kohesif secara internal. Lebih serius menurut Baldock (2014: 8) yang lebih penting dari kebijakan sosial adalah seberapa besar perhatian pemerintah pada kegiatan sosial. Baginya itu sudah menjadi perbandingan yang pas.

Benar apa yang dikatakan Titmuss (1974:138-139) bahwa kebijakan merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Sehingga makna kebijakan bagi kelompok, organisasi, atau masyarakat jika perubahan itu saling diupayakan. Masih menurut Titmuss, kebijakan harus berorientasi pada tindakan dan berorientasi pada masalah. Ini sebenarnya kurang pas, karena belum beranjak pada orientasi solusi.

### 3. Kesejahteraan

Setiap kebijakan yang kemudian menjadi konsumsi publik memiliki konsekuensi pro dan kontra. Kebijakan yang bersifat sosial masih memiliki dampak pada kesejahteraan. Pendapat Spicker (2013: 1), penyediaan kesejahteraan berorientasi untuk melayani kepentingan fisik dan material penerima. Bagaimanapun sifat kesejahteraan masih mengedepankan egaliter. Perkara ini sangat sensitif terutama sasaran masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

Dengan cara yang berbeda, cara berpikir ekonomi dimodifikasi ketika keprihatinan kesejahteraan sosial diperkenalkan, kali ini menuju ekonomi historis-institusional yang melihat penerapan pemikiran ekonomi sebagai tergantung pada detail situasi sosial yang harus diketahui melalui penyelidikan sosial (pertimbangan serupa juga menjadi dasar pemikiran Keynes). Namun, kepedulian terhadap kesejahteraan

sosial juga menyediakan aplikasi pemikiran sosial-struktural, yang dapat berfungsi untuk mengidentifikasi penyebab sosial kemiskinan, sehingga menggeser tanggung jawab dari individu ke situasi sosial dan memungkinkan argumen bahwa kebijakan publik dapat diintervensi secara adil, (Fischer, Miller, Sidney, 2007: 33).

Dengan berfokus pada istilah 'kebijakan sosial' sejauh ini, yang merupakan berkonsentrasi pada kegiatan pemerintah atau kebijakan lain dalam mencapai tujuan sosial. Namun, banyak kebijakan sosial lebih tertarik pada apa yang secara luas dapat disebut kesejahteraan sosial dan yang hanya sebagian merupakan produk dari apa yang pemerintah dan pembuat kebijakan lakukan. Kesejahteraan sosial lagi-lagi merupakan istilah yang sedikit diuntungkan karena didefinisikan dengan sangat ketat. Penulis menggunakannya dengan cara yang sedikit berbeda tergantung pada masalah yang dicermati. Kadang-kadang mengacu pada aspek kesejahteraan yang sangat material seperti akses ke sumber daya ekonomi. Di lain waktu, kata itu digunakan untuk mengartikan kondisi yang tidak mudah terlihat seperti kepuasan, kebahagiaan, ketiadaan ancaman, dan kepercayaan terhadap masa depan. Seluruh bidang penelitian yang disebut 'studi kualitas hidup' berupaya memahami dan mengukur apa yang diyakini orang sebagai unsur utama kesejahteraan mereka. Kesejahteraan sosial dapat dipikirkan dari segi konsep kesejahteraan individu tetapi seperti namanya, itu juga digunakan untuk merujuk pada bentuk kesejahteraan kolektif (kesejahteraan kolektif) yang lebih kolektif, seperti konsep keseluruhan, (Baldock, 2014: 20).

Pandangan Feinburg (dalam Spicker, 2013) ada upaya yang harus diperjuangkan, yang ia sebut sebagai "*welfare interests*". Bidang-bidang yang telah menjadi orientasi kesejahteraan untuk menjangkaunya tidak lain diupayakan dengan kepentingan. Urusan kesejahteraan menurut Hacker (2004: 247) adalah urusan administratif. Penerapannya sampai tingkat bawah adalah pengaturan subsidi yang secara sukarela dan manfaatnya dirasakan secara pribadi.

Dalam kajian pustaka ini, taksonomi dari penelitian sejenis mengungkapkan:

#### Nama:

1. Haryati Roebyantho dan Nunung Unayah (2014)
2. Bram Christanto (2015)
3. Nisa Agistiani Rachman (2014)
4. Moh. Sidik Priadana dan Efendi M. Guntur (2010)
5. Suyanto dan Bambang Pudjiyanto (2015)

#### Judul:

1. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat.
2. Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
3. Di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
4. Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut
5. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan serta Dampak dari Kelompok Usaha Bersama di Jawa Barat.
6. Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Sejahtera (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen)

## Metode:

1. Strategi “*restrospective analysis*” dengan teknik-wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD)
2. Kuantitatif (*eksplanatory*) dengan cara observasi, kuesioner dan wawancara
3. Kualitatif deskriptif, berdasarkan hasil observasi, wawancara, rekaman, dan foto.
4. Metode deskriptif dan metode induktif dengan penelitian survey penjelasan (*explanatory survey method*).
5. Pendekatan evaluatif, dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi dan FGD.

## Hasil:

1. Sosialisasi yang belum tuntas menghasilkan program RTLH belum bisa dikontrol sampai penerima program.
2. menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Desa Gundi Kecamatan Godong sudah memenuhi standar pola makan yang sehat dan bergizi.
3. a) inkonsistensi antara latar belakang lahirnya program dan tujuan besar program dengan indikator keberhasilan; b) inkonsistensi antara wujud program dengan tujuan khusus (poin c dan d); c) inkonsistensi antara wujud program dengan asas yang digunakan; d) inkonsistensi antara kelompok sasaran dengan tujuan khusus (poin c), sasaran kegiatan (poin a, d, dan e), dan e) indikator keberhasilan (poin b).
4. keberhasilan KUBE sangat ditentukan oleh variabel *entrepreneurship* dan kualitas kelembagaan.
5. menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu masyarakat yang dibina kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi semakin sejahtera serta memiliki harapan hidup. Bahkan mereka masih bisa menabung untuk keperluan pendidikan dan kesehatan.

Diketahui bahwa pelaksana di tingkat regional atau si penerima program belum memahami sepenuhnya alur keterlaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti tidak atau sedang dalam posisi memperbaiki terlaksananya kebijakan. Seperti diketahui bahwa besaran dana yang diterima untuk memperbaiki rumah sampai jadi, padahal dana tersebut untuk stimulus atau pemantik agar masyarakat penerima program tergerak untuk memperbaiki rumahnya.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif (Creswell, 2009). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif (studi kasus) yaitu paparannya bersifat naratif dan menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan *how, why*, (Yin, 2009: 1).

Yaitu dengan model partisipatif untuk mendapatkan informasi pelaksanaan Kebijakan Desa Sejahtera Mandiri yang berlokasi di Desa Gajahrejo dan Sidodadi, Desa Pamotan Kabupaten Malang dan Desa Lebak Jabung Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini ingin menyajikan data yang berkategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengembangan desa wisata. Bukti yang tersajikan penting untuk ditampilkan agar kebijakan yang diimplementasikan tepat sasaran. Sebab pengkategorian DSM sudah cukup jelas untuk dapat dilaksanakan di daerah.

Dari hasil pengumpulan data, diperoleh sejumlah sumber data yang dihimpun yakni: Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan

Ketua RT, tim pengelola wisata (pokdarwis), dan ketua LMDH (lembaga masyarakat desa hutan). Peneliti juga hadir di lokasi penelitian sebagai partisipan penuh. Dalam pengertian dengan ikut terlibat dan mendatangi masing-masing lokasi sasaran. Dapat diketahui bagaimana kondisi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan studi dokumentasi) (Cresswell: 2009). 1) *Observasi*, melakukan pengamatan berdasarkan rincian komponen masyarakat penerima program. Maka observasi dilakukan dari tingkat desa ke dusun dan kemudian sampai ke RT. 2) *Wawancara*, untuk mendukung hasil identifikasi di lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa (Carik), Kepala Dusun, dan Ketua RT, Pokdarwis, dan Ketua LMDH. Wawancara dilakukan sembari mendatangi masing-masing penyandang masalah sosial, masalah pengelolaan wisata, dan strategi pengembangan wisata. 3) *Studi Dokumentasi*, terbagi menjadi dua, yaitu: dokumen berupa file dan dokumen berupa foto.

Selanjutnya dalam analisis data yang sudah diperoleh di lapangan (observasi, wawancara, dan studi dokumentasi) dideskripsikan dengan mencocokkan pada masing-masing catatan lapangan. Data dari catatan lapangan yang kemudian direduksi, dideskripsikan, dianalisis, dan ditafsirkan (Creswell, 2007: 150-152). Menurut Creswell (2013: 94) setidaknya kenapa analisis dilakukan adalah untuk: (1) menghindari keberpihakan pada informan (subjektif), (2) menghindari kebocoran dari hasil yang positif, (3) menjaga privasi dan menyembunyikan identitas (nama) informan.

## III. Hasil dan Pembahasan

### A. Hasil

Metode menjadi lebih partisipatif karena masyarakat setempat memainkan peran yang lebih besar dan lebih aktif dalam proses pengumpulan informasi. Menanggapi kuesioner adalah salah satu bentuk partisipasi pasif yang paling terbatas. Jenis partisipasi yang lebih aktif mungkin melibatkan menggambar peta atau berpartisipasi dalam diskusi yang lebih terbuka. Kedua jenis interaksi ini memungkinkan masyarakat setempat untuk mengungkapkan keprihatinan mereka sendiri dan bukan hanya menanggapi apa yang diminta orang lain. Tingkat partisipasi yang masih lebih tinggi dicapai ketika penduduk desa menetapkan agenda untuk studi ini, menentukan pertanyaan, mengumpulkan informasi, dan terlibat secara integral dalam analisis dan penggunaan informasi tersebut.

Keputusan untuk menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif atau lebih *top-down* akan tergantung pada apa yang ingin dicapai. Jika tujuan penelitian ini murni untuk mengumpulkan informasi, mungkin tidak ada alasan khusus untuk mendorong partisipasi yang lebih besar. Memang, mungkin ada alasan untuk tidak pergi ke rute partisipatif karena ini akan membebani waktu dan upaya yang cukup besar pada anggota masyarakat yang terlibat. Namun, jika tujuan dari penelitian ini adalah kombinasi dari pengumpulan informasi dan membuat penduduk lokal untuk “ikut serta” dalam proses atau untuk menjadi lebih terlibat dalam pengambilan keputusan, maka aspek partisipatif menjadi sangat penting. Semakin banyak anggota masyarakat yang menjadi peserta aktif dalam penelitian (dibandingkan dengan peserta pasif yang hanya menanggapi inisiatif yang diambil oleh orang luar), semakin besar kemungkinan mereka akan merasakan kepentingan dalam proses

tersebut. Dan, semakin mereka merasakan kepentingan dalam proses tersebut, semakin mereka akan termotivasi untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

Dari penelitian ini ingin mengetahui dua hal, yakni: (1) efektivitas pelaksanaan program DSM di Desa Gajahrejo dan Desa Sidodadi, (2) ketercapaian program DSM bagi masyarakat Desa Gajahrejo dan Desa Sidodadi.

### 1. Efektivitas Program DSM

Indikator keterlaksanaan program RTLH dapat dilihat dari: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan mencakup kepastian dan kesesuaian data penerima program dari kriteria yang telah ditentukan. Pelaksanaan mencakup proses penggarapan rumah sampai jadi sesuai perencanaan pembangunan (seberapa lama dan seberapa layak digunakan). Sedang evaluasi mencakup kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan yang telah dikerjakan.

Secara rinci dalam perencanaan, ditetapkan data PMKS yang mencakup 22 kriteria. Adapun data di lapangan ditemukan terdapat 9 jenis kriteria PMKS. Ketercapaian program jika disesuaikan dengan model DSM, maka program terlaksana belum mencapai target capaian program. Hal ini dibuktikan dengan fokus program yang terpantau dan didampingi adalah program RTLH yang menjadi bagian dari 22 kriteria PMKS. Sedang delapan kriteria yang ada di Desa Gajahrejo dan Desa Sidodadi belum menjadi prioritas utama.

Terdapat 60 penerima (Desa Gajahrejo dan Desa Sidodadi) program RTLH yang dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) berubin tanah, (2) berinding bambu atau kalsiboard kualitas rendah, (3) genteng kualitas rendah atau bocor, (4) belum berdaya untuk merenovasi rumah. Dengan tingkat keparahan rumah dan penghuni yang berbeda, renovasi melalui program RTLH disama-ratakan nominal yang diterima per masing-masing penerima program. Dalam pelaksanaannya pula ditemukan ketidaktuntasan informasi dari pemerintah pusat ke pelaksana daerah hingga pemerintah desa dan penerima program. Nominal yang dikeluarkan pemerintah bahwa sebagai bagian dari pemantik agar masyarakat berupaya dan bertekad memiliki rumah yang layak belum dipahami secara penuh. Dampaknya adalah tingkat kebergantungan penerima program yang terlalu tinggi serta tidak memiliki kesiapan dalam membangun rumah yang layak. Ditambah dana yang diberikan juga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tukang dan pekerja bangunan meskipun sifatnya gotong-royong.

Sehingga antara Desa Gajahrejo dan Desa Sidodadi, terdapat perbedaan dari hasil renovasi rumah. Perbedaan tersebut cukup mencolok bagi masyarakat, sebab di Desa Sidodadi hasilnya lebih maksimal daripada di Desa Gajahrejo.

Selanjutnya dari program KUBE, Desa Gajahrejo lebih maksimal karena telah terbentuk 3 (tiga) KUBE, yakni; KUBE Wisata 2 (dua) kelompok dan KUBE PKK. Masing-masing beranggotakan 10 orang sesuai kriteria pembentukan KUBE dari Kementerian Sosial.

### 2. Ketercapaian Program DSM

Data yang digunakan untuk menentukan prioritas program dan atau orientasi program menuju Desa Sejahtera Mandiri memiliki target berjangka 5 (lima) tahun. Dengan diberikannya wewenang untuk menentukan penerima program, semestinya

dalam pendampingan program lebih maksimal. Dengan didukung dari perguruan tinggi dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memudahkan dalam pencapaian program.

Berikut ini saya sertakan hasil workshop dalam realisasi program RTLH dan KUBE.

**Tabel 2: Hasil Workshop Desain DSM Tahap Realisasi Program RTLH dan KUBE**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Menentukan desain DSM menurut Desa Gajahrejo dan Desa Sidodadi	Pemahaman konsep desain DSM
2	Perumusan bersama pelaksanaan program DSM tahun pertama.	Pelaksanaan program RTLH dan KUBE
3	Penyapaian hasil pemetaan PMKS, RTLH, dan KUBE	Terkumpulnya data PMKS dan penerima RTLH dan KUBE
4	Penentuan pencapaian desain program DSM dalam jangka waktu 5 tahun ke depan	Semua perangkat menyepakati desain program DSM
5	Kewenangan penuh kepada seluruh perangkat desa dalam pelaksanaan program DSM	Kepala Dusun memiliki kewenangan untuk menentukan penerima RTLH dan KUBE.

Sumber: Data Diolah

Data yang dihimpun di lapangan mengungkapkan bahwa tingkat kebergantungan pemerintah desa lebih dominan. Dibuktikan dengan belum adanya upaya sistematis dari *support* yang diberikan oleh pihak luar. Artinya pemerintah desa sebatas menjembatani antara pelaksana program dengan penerima program. Sehingga target DSM masih dalam ruang lingkup program RTLH. Sedangkan program KUBE belum terkoordinir dalam membudayakan perekonomian masyarakat. KUBE ini lebih cenderung menjadi milik pribadi-pribadi yang telah memiliki usaha baik di bidang pariwisata, kuliner, ataupun IKM.

Sejak awal dibentuk, program KUBE tersebut tidak memiliki pendamping baik dari desa maupun dari pelaku usaha. Hal ini mengakibatkan program KUBE tidak memiliki target dan pengembangan dalam usaha.

### 3. Strategi Pengembangan Wisata dalam Program DSM

Orientasi pengembangan desa karena memiliki sumberdaya yang cukup, banyak yang diarahkan menjadi pengembangan desa wisata. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) desa yang menjadi orietasi pengembangan desa wisata yang mengambil lokasi di 2 (dua) kabupaten, yakni Desa Pamotan (Kab. Malang) dan Desa Lebak Jabung (Kab. Mojokerto). Potensi alam berupa sumber air dan sungai dimanfaatkan untuk wisata *rivertubbing*. Dalam hal meningkatkan partisipasi warga dalam pengembangan wisata, pada 2 (dua) desa tersebut terdapat pendekatan yang berbeda. Desa Pamotan menerapkan pendekatan tradisional yakni dengan acara encek-encek yang diikuti oleh warga, tari tradisional dan permainan tradisional, serta wisata edukasi berupa tanam padi, *angon* bebek, dan *angon* kerbau. Berikutnya, di Desa Lebak jabung menerapkan pendekatan lingkungan yang merupakan pengejawantahan dari Gerakan Komunitas Peduli Lingkungan

(GaKOPEN). Agenda pelestarian lingkungan diterapkan atas partisipasi dan dukungan pemerintah desa.

Sebagai bagian dari model pengembangan wisata, setidaknya harus memuat kecukupan sumberdaya. Terdapat 2 (dua) jenis sumberdaya yang dimaksimalkan untuk mendukung pengembangan wisata, yakni: 1) manusia, dan 2) material. Sumberdaya manusia memuat kelompok sadar wisata (pokdarwis)/LMDH, pemuda desa, dan perangkat desa. Sedangkan sumberdaya material memuat alat, bahan, perlengkapan, dan tata kelola wisata. Perpaduan sumberdaya tersebut mendorong tercapainya target pengembangan wisata secara partisipatif.

Selain melalui pendekatan partisipatif, pengembangan wisata memuat pula aspek kesejahteraan. Maka, dapat disusun strategi pengembangan wisata sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3: Strategi Pengembangan Wisata**

Sumber daya	Pendekatan		
	Konsep Wisata	Partisipasi	Kesejahteraan
Manusia	1. Edukasi dan Kebudayaan 2. Kelestarian Lingkungan	1. Perangkat Desa 2. Pokdarwis/LM DH 3. Komunitas/M ahasiswa	1. Pengelola Wisata 2. Warga Desa
Material	1. Tanam Padi 2. Angon Kerbau 3. Encek-Encek 4. Tari Tradisional 5. Permainan Tradisional 6. Tanam Pohon 7. Sebar Benih Ikan	1. Warga Desa 2. Karang Taruna 3. Komunitas luar desa	1. Perawatan alat dan bahan wisata 2. Penambahan paket wisata
Legitimasi Sosial dan Hukum	Kode Etik dan Nilai Jual Wisata	Aturan berupa SK Desa, Kenotaritan, Dukungan Dinas Pariwisata	Ketetapan penentuan bagi hasil dan pencegahan konflik internal lembaga

Sumber: Data Diolah

Strategi pengembangan wisata harus ditetapkan bahwa wisata tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Desa. Hal ini untuk menghindari kecenderungan para investor yang akan mengambil alih-kelola wisata. Selain itu dengan ditetapkannya legitimasi hukum melalui proses pengembangan wisata berpotensi untuk mempertahankan dominasi pengelola wisata dari campur tangan perhutani.

**B. Pembahasan**

Sesuai amanat UUD 1945, upaya memajukan kesejahteraan umum terus digalakkan meski ganti presiden dan menteri. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 mengalami penurunan yang tercatat di dari bulan Maret – September. Bulan Maret sebesar 27, 77 juta (10,64%) sedang

bulan September sebesar 26,58 juta (10,12%), mengalami penurunan sebesar 1,19 juta orang. Jumlah ini tentu akan terus bergerak seiring percepatan penuntasan kemiskinan. Meski sangat sulit, upaya pemerintah yang salah satunya melalui Menteri Sosial ada beberapa program diantaranya: PKH, DSM, bantuan pangan non tunai, program kesejahteraan sosial anak, pemberdayaan KAT, LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga).

Menurut Rosidi (2016:145) daur kebijakan (heuristika) terdapat 5 (lima) tahap yaitu: pengajuan prakarsa kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi kebijakan, dan tindak-lanjut kebijakan. Muatan secara hermeneutika dalam kebijakan program DSM secara umum perlu evaluasi dalam pelaksanaan teknis dan pelaksana lapangan. Masih adanya indikasi mencari keuntungan dari bantuan program yang berdampak pada ketidakcocokan hasil renovasi rumah. Tentu tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) baik dari pelaksana seperti perangkat desa, TKSK, atau dari pelaksana lapangan turut bertanggungjawab tuntasnya program.

Jika didasarkan pada pendapat Cohen dan Spillan (2016), bahwa lembaga pusat (pemerintah) memiliki otoritas dan kekuasaan yang sangat besar (Holmes, 1979; Lewis, 1985). Pengendalian terbesar yang berada di tingkat pusat, dalam penelitian ini belum terkoordinir hingga tingkat bawah. Memunculkan kesan, pengendalian program terbatas oleh dukungan dana, belum pada pengendalian kecocokan pencapaian program.

Mengacu pada proses kebijakan publik dari Taufiqurokhman (2014; 16) yang mengutip pendapat Dunn (1994), terdapat 5 (lima) proses, yakni; perumusan, forecasting, rekomendasi, monitoring, dan evaluasi. Disesuaikan dengan hasil penelitian ini, kebijakan yang bersifat program tidak cukup selesai pada tataran evaluasi. Dengan mencermati pada target dan capaian program yang tidak memungkinkan dilaksanakan sekali waktu, maka peneliti menambahkan setelah proses evaluasi perlu adanya keberlanjutan (*sustainability*).

Untuk mencermati lebih jauh terhadap masalah dalam pelaksanaan program, hasilnya dapat dianalisis sebagai berikut:

**Tabel 4. Analisis SWOT RTLH, KUBE, dan Pengembangan Wisata**

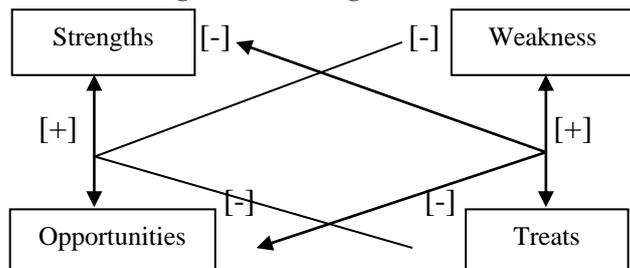
Aspek	Strengths	Weakness	Opportunities	Threats
SDM	Masyarakat penerima program berusaha memenuhi kebutuhan kelengkapan bangunan. Anggota kelompok KUBE masih aktif mempromosikan makanan ringan. Pokdarwis/LM HD memiliki orientasi wisata yang strategis.	Masyarakat penerima program perlu warga sekitar untuk mengola semua kebutuhan bangunan. Anggota kelompok jarang berkumpul dan menciptakan inovasi baru. Gotong Royong warga kurang maksimal.	Dukungan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan target program. Berpotensi menambah anggota dari RT/Dusun lain. Berpotensi melibatkan karang taruna.	Ketidakterpapannya masyarakat pada penerima program. Sering terkalahkan dengan kegiatan lain di luar KUBE. Berpotensi ada keterlibatan investor dan perhutani.

Alat/Bahan	Mudah diperoleh. Tersedia di desa tersebut. Tersedia dan dapat disediakan sesuai kemampuan swadaya.	Dana pemantik program cukup memenuhi kebutuhan. Terbatas pada jenis tertentu (pisang, ikan). Alat dengan biaya tinggi belum mampu disediakan.	Dapat support dari saudara untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Harga murah. Dukungan dari pemerintah desa.	Bahan baku yang murah tidak bisa bertahan lama. Karena terbatas pada jenis tertentu, agak susah mendapatkan bahan baku jenis lain. Alat dan bahan mahal
Pemerintah desa	Mendukung terlaksananya program. Mendukung usaha mandiri dari masyarakat.	Tidak bisa memantau secara penuh dari perencanaan sampai <i>finishing</i> . Belum turut serta mempromosikan produk KUBE. Belum turut serta mempromosikan wisata.	Pemenuhan program segera terrealisasi. Memberikan pemantik dana untuk keberlanjutan KUBE. Legitimasi hukum.	Ketidakepercayaan masyarakat pada pemerintah desa dalam hal keuntungan produksi. Kepentingan pemerintah desa dengan investor dan perhutani
Produk (KUBE)	Memiliki bahan baku dan mudah diproduksi	Nilai jual di pasar masih rendah atau terbatas pada para wisatawan	Melalui mahasiswa yang berkunjung ke wisata dapat mempromosikan produk di sekitar kampus	Kalah bersaing dengan produk-produk yang sudah memiliki <i>brand</i> .

Sumber: Data Diolah

Dari analisis tersebut jika *strengths* dengan didukung *opportunities* akan mengurangi ketidaktercapaian program yang diakibatkan oleh faktor *weakness*. Sedang *treats* lebih pada bagian pertimbangan atau kecenderungan. Bila positif cenderung mengarah pada pengurangan dominasi *opportunities* begitu pula sebaliknya. Hal ini juga berlaku pada analisis *weakness*, bila bersifat positif dominasi *opportunities* semakin berkurang. Dari penjabaran tersebut dapat digambarkan pada bagan berikut:

Bagan 1: Persilangan Analisis SWOT



Sumber: Konstruksi Peneliti

Dalam hal kebijakan, analisis didasarkan pada pendekatan perencanaan dan evaluasi. Sedang penjelasan dari tabel 1, 2, 3, 4 dan bagan 1 berorientasi pada pelaksanaan dan evaluasi atas implementasi program dari keputusan kebijakan sosial.

#### IV. SIMPULAN

*Pertama*, efektivitas program DSM bertumpu pada indikator perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk melihat keefektivan program, penting mengaitkan antara ketiga indikator tersebut. Akhirnya, kesesuaian program dapat dijelaskan secara berurutan.

*Kedua*, keterlaksanaan program DSM didasarkan pada alur proses kebijakan. Dengan menjelaskan hasil penelitian ini, peneliti menambahkan proses kebijakan setelah evaluasi adalah keberlanjutan (*sustainability*). Bahwa dengan target dan pencapaian program tak dapat terselesaikan dalam sekali waktu. Artinya perlu rancangan jangka pendek, menengah, dan panjang.

#### REFERENSI

- [1] Baldock, John. *Social Policy, Social Welfare, and the Welfare State*. Online (<https://www.researchgate.net/publication/265156235>). Diakses, 5 April 2018. 2014.
- [2] BPS. *Jumlah Penduduk Miskin tahun 2017*. Online, ([www.bps.go.id/](http://www.bps.go.id/)). Diakses, 6 April 2018.
- [3] Chambers, Robert.. *What is Proverty? Concept and Measures*. Proverty in Focus. International Poverty Centre. 2006.
- [4] Claridge, Tristan. *Designing Social Capital Sensitive Participation Methodologies*. New Zealand. Social Capital Research. 2004.
- [5] Cohen, David K., Spillane, James P. *Policy and Practice: The Relations Between Governance and Instruction*. Michigan State University. 2016.
- [6] Creswell, J. W. *Qualitative Inquiry & Research Design; Choosing Among Five Approaches*. New Delhi; Sage Publications. Second Edition. 2007.
- [7] Creswell, J. W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Achmad Fawaid. 2012. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- [8] Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. New Delhi; SAGE Publications Iner., Pvt. Ltd. 4th ed. 2013.
- [9] Cochran, Charles L. and Malone, Eloise F. *Public Policy: Perspectives and Choices*. Suite: Linne Rienner Publisher. 2014.
- [10] Fischer, Frank., Miller, Gerald J., Sidney, Mara S. *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. Taylor & Francis Group: CRC Press. 2007.
- [11] Freudenberger, Karen S. *Rapid Rural Appraisal (RRA) and Participatory Rural Appraisal (PRA): A Manual for CRS Field Workers and Partners*. 228 W. Lexington Street, Baltimore, Maryland 21201-3443, [www.crs.or](http://www.crs.or).
- [12] Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. *Panduan Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA)*. Jakarta: PT Bina Marina Nusantara. 2006.
- [13] Hacker, Jacob, S. *Privatizing Risk without Privatizing the Welfare State: The Hidden Politics of Social Policy*

- Retrenchment in the United States*. American Political Science Review, Vol. 98 (2). 2004.
- [14] Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- [15] Kementerian Sosial RI. *Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat*. Online, ([www.kemsos.go.id](http://www.kemsos.go.id)). Diakses, 6 April 2018.
- [16] Kvalvaag, Tale. *A Framework for Analysing Participation in Development*. Norway: Norwegian Agency for Development Cooperation. 2013.
- [17] Rosidi, Sakban. *Penelitian Terapan Profesi Pendidikan*. Malang: NAMS. 2016.
- [18] Spicker, P. *Definitions of Poverty: Twelve Clusters of Meaning*. Poverty: an International Glossary, 2007. pp. 229-243.
- [19] Spicker, Paul. *Principles of Social Welfare: an Introduction Thinking about the Welfare State. USA: Routledge*. 2013.
- [20] Taufiqurokman. *Kebijakan Publik; Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers). 2014.
- [21] Titmuss, Richard, M. *Welfare States: Construction, Deconstruction, Reconstrunstruction*. Tanpa Penerbit. 1974.
- [22] Treseder, Phil. *Participation Models: Citizens, Youth, Online*. Creative Commons ([www.creative commons.org](http://www.creativecommons.org)). Diakses 19 Oktober 2019. 2012.
- [23] Viana. *Master of Public Administration Program PAD 5384 Civic groups & public policy*. Diakses 18 Oktober 2019. 2014.
- [24] Yin, Robert, K. *Case Study Research: Design and Methods*. London: SAGE Publications Ltd. Second Ed. 2009.